

PERANAN DEMOKRASI DALAM PEMBATASAN KEKERASAN NEGARA - SUATU TELAAH KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN BERTRAND RUSSELL

*(Democratic Role in The Limitation of State
Violence - A Critical Analysis Toward
Bertrand Russell's Thought)*

Krisni Noor Patrianti¹ dan A. Sudiarja²

Program Studi Filsafat

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The aim of a state is to procure people welfare. Along the history of political affairs of the state rulers often abuse people due to their authoritative power, therefore power of rulers must be controlled in order that violence be limited.

This study discussess the role of democratic procedure as the condition for rulers to use violence. The research uses induction-deduction, internal coherency and intepretation method.

The results of the research show that the limitation of violence is necessary to develop democracy furthermore. Democracy in the context of Russell's thought remains in the interest of individuals, whereas modern thoughts tend to understand democracy in term of social interest.

Key words: ruler -- limitation of violence -- democracy.

PENGANTAR

Masalah kekerasan selalu menjadi topik yang hangat dari abad ke abad, sebab kekerasan terjadi di mana pun dan kapan pun. Adanya negara dimaksudkan untuk mengendalikan kekerasan yang ada di dalam masyarakat, agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan. Dengan kata lain masyarakat membutuhkan perlindungan dari negara. Penguasa negara sebagai pelaku yang memegang kekuasaan negara, mempunyai

1. Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

2. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

peran penting untuk terciptanya kesejahteraan rakyat (Budiardjo, 1977:37).

Dalam perjalanan sejarah, kekuasaan sering disalahgunakan oleh penguasa negara untuk menindas orang-orang yang dikuasainya, oleh karena itu masalah pembatasan kekerasan bagi penguasa negara penting untuk dikaji dan diteliti. Terlebih saat ini negara Indonesia sedang terlibat dalam melakukan tindak kekerasan, sehingga adanya pembatasan kekerasan bagi penguasa negara merupakan masalah yang aktual.

Salah satu faktor yang berperan dalam pembatasan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa negara adalah adanya kehidupan demokrasi di dalam negara tersebut. Demokrasi merupakan faktor yang sangat penting untuk tercapainya kesejahteraan umat manusia. Magnis-Suseno (1994:302) mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat yang demokratis menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh setiap manusia, karena dalam masyarakat yang demokratis setiap orang dapat merasa diperlakukan sebagai manusia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka permasalahan yang diangkat dapat dirumuskan sebagai-berikut: Bagaimana peranan demokrasi dalam pembatasan kekerasan bagi penguasa negara menurut Bertrand Russell?

CARA PENELITIAN

Penelitian mengenai peranan demokrasi dalam pembatasan kekerasan bagi penguasa negara menurut Russell ini akan dilakukan melalui penelitian pustaka, dengan mempergunakan model penelitian historis faktual mengenai tokoh (Bakker dan Zubair, 1990: 61). Sebagai objek material adalah pikiran filsuf Russell tentang demokrasi yang ditinjau dari kaca-mata filsafat politik. Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai-berikut:

Induksi dan deduksi

Semua karya Russell dipelajari sebagai suatu case study dalam menganalisis mengenai konsep demokrasi agar dapat dibangun suatu sintesis.

Koherensi internal

Hal ini diperlukan dalam rangka membuat interpretasi yang tepat mengenai pemikiran Russell, sehingga semua unsur-unsur pemikirannya dilihat menurut keselarasannya secara logis sistematis.

Interpretasi

Peneliti menyelami karya Russell untuk menangkap dan memahami arti demokrasi. Atas dasar pemahaman itu peneliti memberikan analisis kritis terhadap pemikiran Russell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kelompok manusia yang diberi kekuasaan untuk memerintah kelompok manusia lainnya akan menyalahgunakan kekuasaannya itu jika mereka tidak diawasi dengan sanksi (Russell, 1988:218). Dengan demikian wewenang yang dimiliki oleh penguasa negara untuk mempergunakan kekerasan terhadap masyarakat dapat menjadi berbahaya, apabila wewenang tersebut disalahgunakan. Menurut Russell, kekerasan yang dilakukan oleh penguasa negara itu harus dibatasi.

Russell mengemukakan bahwa pembatasan kekerasan yang dapat dilakukan adalah dengan demokrasi, hukum dan keadilan. Penelitian ini hanya membahas tentang peranan demokrasi dalam pembatasan kekerasan negara menurut pandangan Bertrand Russell.

Kehidupan sosial menuntut suatu sikap tertentu yang tidak memihak. Hal ini mengingat bahwa dalam banyak urusan diperlukan suatu tindakan bersama, dan satu-satunya bentuk sikap tidak memihak yang dapat dipraktekkan adalah pemerintahan mayoritas / pemerintahan demokratis (Russell, 1988:213).

Demokrasi ditemukan sebagai suatu sistem untuk merujuk kekuasaan penguasa negara dengan kebebasan warga negara. Demokrasi dimaksudkan untuk membatasi masa kekuasaan seseorang dan membuatnya tergantung pada persetujuan rakyat (Russell, 1976: 154).

Untuk menghindari pemusatan kekuasaan negara tidak melahirkan keburukan-keburukan despotisme atau kelaliman, maka kekuasaan negara itu harus didistribusikan secara luas, sehingga golongan-golongan bawah mendapat otonomi secara luas. Jika tidak, maka gabungan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik akan menjadi alat tirani yang baru dan sangat mengerikan. Russell (1988:226) memberi contoh sebagai berikut: di Rusia, pada saat itu seorang petani di sebuah pertanian kolektif yang mengambil sebagian kecil dari gandum yang telah ia tanam sendiri, dapat dijatuhi hukuman mati oleh penguasa. Ilustrasi yang diberikan oleh Russell itu menunjukkan alangkah menyedihkan dengan apa yang terjadi di suatu negara yang tidak memberikan otonomi secara luas kepada rakyatnya, karena penguasa dapat melaksanakan kekerasan

dengan sewenang-wenang.

Demokrasi, jika kokoh, merupakan suatu jaminan terhadap tindakan penguasa (Russell, 1988: 144), karena dalam suatu negara yang disebut demokratis, sejumlah besar rakyat diikutsertakan dalam kekuasaan politik. Penguasa negara diharapkan selalu berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusannya, karena rakyat akan mengontrolnya. Dengan demikian penguasa negara harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya kepada rakyat.

Di negara demokratis, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjadi budak atau pemberontak, melainkan menjadi warga. Menjadi warga, artinya orang yang memiliki dan bertenggang-rasa dengan orang-lain yang juga memiliki dalam suatu proporsi tertentu. Secara tegas, Russell menekankan pentingnya demokrasi dalam suatu negara, sebab jika tidak ada demokrasi, mentalitas penguasa negara adalah mentalitas majikan. Warga dianggap sebagai orang-orang yang tergantung kepada majikan, yaitu penguasa negara. Harapan Russell, adanya demokrasi akan menciptakan mentalitas kerja-sama berdasarkan persamaan, sehingga memungkinkan individu untuk mengemukakan pendapat secara bebas sampai tingkat tertentu (Russell, 1988: 231).

Dalam artikelnya *The Future of Mankind* (Russell, 1976: 52) Russell mengemukakan " *Only democracy and free publicity can prevent the holders of power from establishing a servile state, with luxury for the few and over-worked poverty for the many*" (Hanya demokrasi dan suara bebas yang dapat mencegah penguasa negara mendirikan negara perbudakan, dengan kemewahan bagi segelintir orang, dan kemiskinan serta kerja keras bagi orang banyak). Menurut Russell, itulah yang dilakukan oleh negara Rusia yang mendirikan negara perbudakan, sehingga terdapat kesenjangan yang lebar. Di dalam negara demokratis kesenjangan yang ada cenderung berkurang.

Russell (1988:145) tidak menutup mata terhadap keterbatasan dari demokrasi. Menurutny, sebagai cara memerintah, demokrasi mempunyai beberapa keterbatasan, baik itu keterbatasan mendasar maupun keterbatasan lainnya yang dapat dihindari. Keterbatasan mendasar itu berasal dari dua faktor, yaitu : ada keputusan-keputusan yang harus diambil dengan cepat, dan ada yang memerlukan pengetahuan seorang ahli. Dengan demikian ada keharusan mutlak untuk bertindak cepat, dan ada persoalan-persoalan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang.

Keterbatasan-keterbatasan mendasar seperti itu, menyebabkan adanya persoalan-persoalan penting yang harus dipercayakan kepada

penguasa negara. Ukuran suatu negara disebut negara demokratis dan demokrasinya dapat dikatakan berhasil sejauh penguasa diwajibkan untuk menghormati pendapat umum (Russell, 1988:146).

Russell (1988:214) mengingatkan, bahwa demokrasi walaupun penting, bukan satu-satunya persyaratan yang diperlukan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Karena dalam demokrasi ada kemungkinan bagi mayoritas untuk melakukan tirani yang kejam terhadap minoritas. Dengan demikian perlu diperhatikan urusan-urusan mana yang harus ditangani oleh masyarakat secara keseluruhan, dan urusan-urusan mana yang tidak memerlukan keseragaman.

Istilah demokrasi muncul di Yunani kuno pada tahun 508 SM, sebagai sebutan dari bentuk pemerintahan demokratia. Istilah itu berasal dari kata Yunani demos (rakyat), dan krattein (pemerintahan). Menurut sistem pemerintahan demokratis, semua keputusan penting diambil oleh suatu majelis yang berjumlah 500 orang yang dipilih untuk jangka waktu satu atau dua tahun oleh semua warga negara (di mana budak dan wanita tidak dihitung). Majelis itu mengangkat dan memberhentikan para pemimpin. Makna demokrasi pada saat itu adalah, bahwa negara-negara kota yang sejak dahulu diperintah oleh penguasa yang bukan demokratis (entah itu bangsawan, golongan elit, raja atau diktator) diubah menjadi sistem dimana sejumlah besar orang laki-laki yang bebas dan dewasa berhak berpartisipasi langsung sebagai warga negara dalam pemerintahan (Magnis-Suseno, 1997:35).

Pada masa pemerintahan pra-modern itu bentuk pemerintahan yang demokratis, yang mengizinkan partisipasi langsung rakyat, sangat jarang dan terbatas pada satuan-satuan politik yang cukup kecil. Sedangkan demokrasi modern, lahir dari perubahan-perubahan mendalam pada abad 16, yang ditandai dengan menguatnya nilai-nilai baru, yaitu pengakuan kesamaan hak manusia dan paham kedaulatan rakyat. Peristiwa sejarah yang secara nyata menempatkan demokrasi di ambang modernitas adalah Revolusi Amerika dengan pernyataan kebebasan pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis dengan pernyataan tentang hak asasi manusia pada tahun 1789 (Magnis-Suseno, 1996:77).

Salah satu penjabaran Russell dari liberalisme adalah persyaratan demokrasi di samping hukum dan keadilan. Ketiga syarat tersebut digunakan untuk membatasi kekerasan yang dilakukan oleh penguasa negara terhadap rakyatnya. Menurut Russell ketiga syarat di atas, yaitu: demokrasi, hukum dan keadilan, saling berhubungan satu sama lain; karena demokrasi tidak dapat benar-benar terwujud tanpa hukum dan keadilan.

Di alam demokrasi, kekuasaan seorang penguasa negara (entah itu raja, presiden, atau perdana menteri) adalah terbatas. Kekuasaan tersebut harus dibatasi oleh kehendak rakyat dan hukum. Kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa negara itu tidak boleh menyimpang dari kehendak rakyat. Kebijakan negara harus mampu menyuarakan aspirasi dan nurani rakyatnya, dengan demikian kedaulatan berada di tangan rakyat.

Berbeda dengan Russell, Magnis-Suseno berpendapat, bahwa demokrasi bukan sekedar kedaulatan rakyat, melainkan juga operasionalisasinya. Demokrasi berarti bahwa elit politik itu berada dalam kontrol masyarakat, dan bahwa masyarakat dapat menentukan siapa saja yang memimpinnya. Masyarakat dapat secara efektif menyatakan dan menentukan arah kebijakan politik serta kebijakan-kebijakan lain yang harus dijalankan penguasa negara (Magnis-Suseno, 1995: 140). Menurut Russell, kontrol terhadap negara itu dilakukan oleh rakyat yang merupakan kumpulan individu-individu, bukan kelompok-kelompok masyarakat.

Russell menegaskan pentingnya negara demokratis, tetapi ia belum menguraikan ciri-ciri negara demokrasi secara terperinci. Dalam pada itu Magnis-Suseno (1996:78) sudah menguraikan tentang ciri-ciri negara demokrasi secara terperinci sebagai-berikut:

1. Kekuasaan negara diselenggarakan berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin kontrol demokratis atas pemerintah.
2. Negara taat pada hukum.
3. Hak asasi manusia terjamin.
4. Ada dewan para wakil rakyat yang terpilih dengan bebas dalam suatu pemilihan umum.
5. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau dewan para wakil rakyat
6. Rakyat, baik langsung atau tidak, berhak menyoroti pemerintah, bebas mencari informasi, menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah.

Dengan demikian, demokrasi merupakan suatu tuntutan di jaman modern saat ini untuk tercapainya kesejahteraan rakyat.

Russell juga mengakui, bahwa sistem demokrasi mempunyai kelemahan - kelemahan, karena demokrasi belum dapat menjamin bahwa penguasa negara akan bertindak adil terhadap rakyatnya. Pendapat Russell itu senada dengan yang diungkapkan oleh Magnis-Suseno, bahwa sistem demokrasi masih mempunyai kekurangan, karena realitas demokrasi sering jauh dari apa yang dicita-citakan. Demokrasi adalah suatu sistem di mana kekurangan-kekurangan itu dapat disuarakan

secara terbuka.

Demokrasi terbuka terhadap segala kritik, koreksi dan pembaharuan, sehingga dalam demokrasi kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara optimal. Penguasa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau berbuat sesuai dengan keinginan sendiri, karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Lebih lanjut Magnis-Suseno mengatakan bahwa, tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum, dimana rakyat dapat hidup sebaik dan seadil mungkin. Kesejahteraan umum menjadi tugas yang harus diusahakan oleh negara, karena meliputi kesejahteraan individu-individu dan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat.

Kesejahteraan umum terdiri dari sejumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat hidup sejahtera. Sejahtera dapat dirumuskan baik secara negatif maupun positif. Secara negatif, manusia disebut sejahtera apabila ia bebas dari perasaan lapar, kemiskinan, kecemasan akan hari esok, rasa takut, dan dari penindasan. Secara positif, manusia disebut sejahtera apabila ia merasa aman, tenteram, selamat, dan dapat hidup sesuai dengan cita-cita serta nilainya sendiri, sesuai dengan aspirasi-aspirasi dan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya (Magnis-Suseno, 1994:315). Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan/mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan (Magnis-Suseno, 1994:314).

Russell kurang membicarakan tentang kesejahteraan umum dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ia lebih memandang masyarakat dalam kerangka hubungan antar individu. Pokok perhatian Russell adalah kesejahteraan individu, karena pemikirannya dilandasi oleh liberalisme yang didasarkan atas kebebasan individu.

Minimal kesejahteraan harus meliputi jaminan atas hak-hak asasi manusia. Satu-satunya yang dapat mengusahakan kondisi-kondisi kesejahteraan para anggota masyarakat adalah negara. Di sini peran penguasa negara sangat penting, yaitu untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat sendiri. Jika keadaan ini dapat terwujud, maka akan berkembang apa yang disebut dengan "*Civil Society*" (masyarakat warga atau masyarakat madani) yang saat ini menjadi

dambaan setiap orang.

Istilah "*Civil Society*", berasal dari bahasa Latin "*cives*" yang berarti warga. "*Civil Society*" adalah suatu model masyarakat yang tercipta berkat partisipasi yang penuh kebebasan oleh sejumlah manusia yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sederajat, dan bersepakat untuk membangun bersama suatu komunitas politik yang disebut negara (Wignjosoebroto, Kompas, 31 Maret 1998).

Dalam pemikiran Russell tentang demokrasi, ia belum menyinggung istilah "*Civil Society*", pemikirannya mengarah pada suatu model masyarakat yang disebut "*Civil Society*". Ia sudah mencita-citakan kehidupan yang penuh dengan cita-cita pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan.

Atas dasar itu, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam negara demokrasi jauh lebih kecil daripada di negara di mana kebebasan politik warga negara ditindas (Budiardjo, 1977:173). Ketidakadilan dapat diatasi apabila semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hal ini dimungkinkan jika undang-undang dijalankan untuk semua orang secara adil.

Saat ini dalam bidang etika politik modern berkembang konsep pluralisme. Istilah pluralisme ini biasanya dipergunakan dalam pembicaraan mengenai hubungan antar agama, tetapi sebagai gejala dalam masyarakat modern pluralisme telah banyak dibicarakan dalam konteks kehidupan bernegara (Sudiarja, 1995:163). Kesadaran akan pluralisme ini berarti bahwa negara mengetahui, menyadari dan peduli adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat (Sudiarja, 1996:17) entah itu perbedaan agama, etnis atau perbedaan sikap politik. Tampaknya negara yang paling ideal tidak bisa lain selain yang menerima pluralisme (Sudiarja, 1995:171).

Di negara demokrasi modern, masing-masing kelompok yang mempunyai perbedaan sikap atau keyakinan dapat menyalurkan aspirasinya dalam pemerintahan. Di sinilah pentingnya konsep pluralisme, sehingga dapat mengatasi keadaan yang dapat terjadi dalam demokrasi liberal, di mana hanya kelompok elit yang dapat berperan dalam pemerintahan. Dengan demikian pluralisme adalah jalan keluar dalam demokrasi modern yang memberikan keluasan partisipasi masyarakat yang di dalamnya mempunyai kekayaan atau nilai-nilai budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Menurut Russell, tindakan kekerasan penguasa negara harus dibatasi untuk melindungi rakyat banyak.
2. Menurut pendapatnya tentang pembatasan kekerasan terhadap penguasa negara, Russell menekankan perlunya negara liberal dimana hak-hak individual manusia dijamin. Melalui penghargaan terhadap hak-hak individual berarti menghargai kebebasan manusia.
3. Berpijak pada paham liberalisme, Russell mengemukakan pentingnya pembatasan kekerasan terhadap penguasa negara yang dilakukan terutama melalui demokrasi.
4. Di alam demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasinya kepada penguasa negara. Menurut asumsi Russell, rakyat adalah kumpulan individu-individu, sehingga kesejahteraan yang ingin diwujudkan dalam negara demokrasi, adalah kesejahteraan individu. Sedangkan dalam paham demokrasi modern yang berkembang saat ini yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan individu-individu dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang plural (majemuk), sehingga kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah sekaligus bersifat individu dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Magnis Suseno, Franz, 1994, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta.
- , 1996, "Demokrasi", dalam Majalah Kebudayaan Umum *BASIS*, Nomer 1-2, tahun ke 45, Januari-Februari 1996.
- , 1997, *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta.
- Russell, Bertrand, 1976, "Ideas that Have Helped Mankind", dalam *Unpopular Essays*, Unwin Paperbacks, George Allen and Unwin Ltd., London.
- , 1976, "Ideas that Have Harmed Mankind", dalam *Unpopular Essays*, Unwin Paperbacks, George Allen and Unwin Ltd., London.
- , 1976, "The Future of Mankind", dalam *Unpopular Essays*, Unwin Paperbacks, George Allen and Unwin Ltd., London.
- , 1988, *Kekuasaan- Sebuah Analisis Sosial Baru*, terjemahan Hasan Basari, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sudiarja, A., 1995, "Pluralisme dalam Negara Modern - Suatu Tinjauan Etika Politik",

dalam Majalah Kebudayaan Umum *BASIS*, No. 5, Tahun ke 44, Mei 1995, Yogyakarta.

-----, 1996, "Pluralisme Harus Menerima Konflik", dalam Majalah Kebudayaan Umum *BASIS*, No. 3-4, Tahun ke 45, Mei-Juni 1996, Yogyakarta.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, 1998, "Prasyarat Terwujudnya Kehidupan Bernegara yang Demokratik", dalam harian *KOMPAS*, 31 Maret 1998.